

Alamat:

Gedung TEMPO
Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210
Telp. 021-5362025
Fax. Redaksi 021-5362025
Fax. Iklan 021-7206995
Fax. Sirkulasi 021-5349596
E-mail. CS@tempo.co.id,http://www.tempo.co

Term Of References
Lomba Karya Tulis Mahasiswa
“Masa Depan Sawit Indonesia di Penghujung Moratorium”

Saat ini, industri sawit memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional sebagai penghasil devisa ekspor, penyedia lapangan kerja, serta tumpuan mata pencaharian jutaan keluarga petani. Indonesia adalah negara pengeksport sawit terbesar di dunia, jauh mengungguli Malaysia sejak tahun 2016.¹ Selain itu, masyarakat Indonesia juga merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia.² Namun demikian, akibat tata kelola yang belum baik, industri sawit telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang tinggi, yang lantas menurunkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Di sisi lain, kurang optimalnya pemungutan pajak dari sektor ini membuat negara kehilangan pendapatan yang besar sementara keuntungan terbesar dari industri ini diraup oleh segelintir taipan. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola sawit Indonesia menjadi sangat penting, antara lain untuk mendorong komoditas minyak sawit berkelanjutan di pasar global, mengoptimalkan pendapatan negara, melindungi aset negara dalam bentuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperbaiki ketimpangan ekonomi dan penguasaan ruang agar sektor ini betul-betul berdampak pada kesejahteraan rakyat secara luas. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau kebijakan moratorium sawit yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018 adalah peluang strategis untuk membenahi tata kelola perkebunan sawit. Dalam waktu tiga tahun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, ditambah Gubernur dan Bupati, diarahkan untuk melaksanakan berbagai tugas spesifik, mulai dari mengumpulkan dan memverifikasi data dan peta terkait perkebunan sawit, menunda izin baru perkebunan sawit di kawasan hutan, serta mengevaluasi izin-izin perkebunan sawit yang berada di dalam atau berasal dari kawasan hutan, termasuk yang masih memiliki tutupan hutan produktif. Saat ini usia Inpres moratorium sawit telah lebih dari 2 tahun, namun demikian implementasi Inpres masih jauh dari harapan dan ada kemungkinan Inpres ini tidak dilanjutkan. Implementasi yang lamban tersebut tidak hanya disebabkan oleh political will pemerintah yang rendah namun juga masih minimnya informasi dan dorongan publik akan pentingnya regulasi ini dan pentingnya perbaikan tata kelola sawit secara umum. Berdasarkan hasil analisis dari search engine optimization pada November 2020, keyword sawit dan moratorium sawit masih sangat minim dibandingkan dengan komoditas lain, hasil pencarian dalam sebulan terakhir hanya mencapai 8100 kali dan 140 kali secara berurutan. Kondisi ini jauh dibawah pencarian komoditas lain seperti kopi dan jagung yang mencapai lebih dari 18.000 pencarian.

Alamat:

Gedung TEMPO
Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210
Telp. 021-5362025
Fax. Redaksi 021-5362025
Fax. Iklan 021-7206995
Fax. Sirkulasi 021-5349596
E-mail. CS@tempo.co.id,http://www.tempo.co

Atas fakta tersebut dibutuhkan upaya konkret dan kreatif untuk meningkatkan public awareness and support terkait pentingnya perpanjangan moratorium sawit dan perbaikan tata kelola sawit secara menyeluruh menuju berkelanjutan. Atas dasar tersebut di atas, Tempo Media Group bekerja sama dengan Yayasan Madani Berkelanjutan mengadakan Lomba Karya Tulis Mahasiswa dengan tema “Masa Depan Sawit Indonesia di Penghujung Moratorium”

TUJUAN

1. Memberi ruang dan wadah ekspresi mahasiswa dalam menuangkan gagasan dan pengetahuan tentang isu sawit melalui karya tulis
2. Memberi apresiasi kepada para mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan khususnya sawit, agar industri ini dapat lebih baik dan berkelanjutan
3. Memberi edukasi dan informasi kepada mahasiswa tentang isu sawit di Indonesia melalui kompetisi
4. Memberi referensi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk pengambilan kebijakan dengan gagasan yang dikemukakan oleh mahasiswa sebagai generasi pemikir dan penerus bangsa

Persyaratan :

1. Follow IG @madaniberkelanjutan dan @majalah.tempo , dan tag 3 temen untuk join lomba ini
2. Karya tulis merupakan hasil Original dan Belum Pernah dipublikasikan dengan cara menandatangani surat pernyataan pada form yang telah disediakan (bit.ly/PernyataanKeaslianKaryaTulis)
3. Kirim Hasil Karya Tulis dalam bentuk PDF
4. Deadline Kompetisi 10 Juni 2021
5. Pengumuman Pemenang Tahap 1 Menuju 10 besar Akan Diumumkan Melalui Email, Telepon dan Social Media Tempo, pada 14 Juni 2021
6. Peserta yang terpilih masuk di tahap 10 besar, akan melaksanakan presentasi dan penjurian langsung (virtual) dengan Juri Utama pada tanggal 21 Juni
7. Registrasi di link pendaftaran Bit.ly/CCKaryaTulisTempo
8. Summary tulisan di capture dan di posting di IG Story, tag dan mention ke IG @madaniberkelanjutan dan @majalah.tempo dengan hastag #masadepansawitindonesia #indonesiatangguh
9. Referensi artikel harus mengutip salah satu hasil publikasi Madani (dapat diakses di www.madaniberkelanjutan.id)
10. Menuliskan nama lengkap, asal kampus di awal karya tulis
11. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

Alamat:

Gedung TEMPO
Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210
Telp. 021-5362025
Fax. Redaksi 021-5362025
Fax. Iklan 021-7206995
Fax. Sirkulasi 021-5349596
E-mail. CS@tempo.co.id,http://www.tempo.co

Tema Karya Tulis : Masa Depan Sawit Indonesia di Penghujung Moratorium

Sub Tema :

1. Moratorium Sawit: Langkah Memperbaiki Tata Kelola Sawit di Indonesia.

Pada subtema ini, peserta dapat membahas peluang dan tantangan kebijakan moratorium sawit yang akan habis pada bulan September 2021 mendatang.

2. Bagaimana Membangun Sawit Berkelanjutan di Indonesia.

Pada subtema ini, peserta dapat membahas urgensi adanya produk- produk sawit yang ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

3. Bagaimana Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit.

Pada subtema ini, peserta dapat membahas langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan para pihak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

4. Bagaimana Mengatasi Bencana Alam akibat Pembukaan Sawit.

Pada subtema ini, peserta dapat membahas permasalahan bencana yang salah satunya diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk sawit baru. Serta kondisi aktual pembangunan desa yang dikelilingi sawit serta solusi inovatif untuk mengurai permasalahan tersebut.

5. Membangun Perekonomian Masyarakat Berbasis Komunitas.

Pada subtema ini, peserta dapat membahas dan merekomendasikan langkah konkrit agar daerah (provinsi/kabupaten/kota) tidak hanya menggantungkan pembangunan dari salah satu sektor tertentu (sawit) semata

Ketentuan Karya Tulis :

1. Maksimal karakter untuk karya tulis yaitu 3400 karakter dengan spasi
2. Karya tulis harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan benar
3. Artikel karya tulis harus memuat satu foto atau gambar yang sesuai dengan bahasan
4. Di dalam artikel harus terdapat judul, serta caption foto yang jelas

Syarat Pendaftaran :

Mengisi seluruh data-data dengan lengkap di form bit.ly/CCKaryaTulisTempo

Alamat:

Gedung TEMPO
Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210
Telp. 021-5362025
Fax. Redaksi 021-5362025
Fax. Iklan 021-7206995
Fax. Sirkulasi 021-5349596
E-mail. CS@tempo.co.id,http://www.tempo.co

Juri :

1. Anton Septian, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo
2. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan

Timeline Kegiatan :

6 Mei : Kick Off dan Pembukaan Lomba
6 Mei – 10 Juni : Pendaftaran, submit karya dan penjangkaran peserta
10 Juni : Batas akhir pemasukan karya tulis
10 Juni – 14 Juni : Seleksi berkas administrasi dan karya tulis tahap 1
14 Juni : Pengumuman 10 besar
21 Juni : Presentasi dan penjurian 10 besar
23 Juni : Pengumuman Pemenang

Teknis Acara : Program ini akan dimulai dengan konten kick off di IG Feed Tempo dan Madani pada tanggal 6 Mei, dalam sesi kick off ini akan diumumkan juga seluruh syarat dan ketentuan lomba, serta hadiah yang akan didapat oleh para pemenang, tanggal 6 Mei juga akan dijalankan promo program di social media tempo (twitter, FB, dan IG Story), di tanggal 6 Mei ini juga sudah mulai dilakukan penjangkaran dan para peserta sudah dapat untuk submit karyanya di link yang akan disediakan Tempo, proses penjangkaran dan submit karya akan berlangsung sampai 10 Juni, pada tanggal 10 Juni adalah sesi closing program, sesi ini akan diumumkan di IG Tempo dan Madani, kemudian pada tanggal 10 Juni - 14 Juni akan dilakukan seleksi berkas dan penjurian terhadap seluruh karya yang masuk, kemudian tanggal 14 Juni akan diumumkan 10 besar yang lolos ke tahap selanjutnya, 21 Juni para 10 besar akan presentasi dan dilakukan penjurian langsung, kemudian tanggal 23 Juni akan diumumkan seluruh pemenang dari program ini.

Hadiah :

Juara 1 (Uang tunai sebesar 3jt Rupiah, plakat, sertifikat dan karyanya dipublikasikan di Majalah Tempo, Kelas Khusus Pelatihan Menulis Menembus dari Tempo, Free Langganan 3 Bulan Tempo Digital, Merchandise Special dari Madani)

Juara 2-10 (Plakat, sertifikat, Kelas Khusus Pelatihan Menulis dari Tempo, Free Langganan 3 Bulan Tempo Digital, Merchandise Special dari Madani)

Juara 11 – 30 (E-certificate, Free Langganan 3 Bulan Tempo Digital, Merchandise Special dari Madani)

PT. TEMPO INTI MEDIA HARIAN

Alamat:

Gedung TEMPO
Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210
Telp. 021-5362025
Fax. Redaksi 021-5362025
Fax. Iklan 021-7206995
Fax. Sirkulasi 021-5349596
E-mail. CS@tempo.co.id,http://www.tempo.co

Target Peserta :

Mahasiswa Diploma dan Strata 1 Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di Indonesia

Kriteria penilaian lomba karya tulis :

Penilaian terdiri dari 2 aspek (naskah karya tulis dan presentasi karya tulis).

1. Penilaian ini dilaksanakan oleh juri yang telah ditentukan oleh panitia.
2. Seleksi pada tahap awal (penyisihan) dilakukan oleh panitia dan seleksi akhir (finalis) dilakukan oleh dewan juri.
3. Tim juri akan menetapkan juara 1 s.d 30. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

Contoh Karya Tulis :



Perhutanan sosial yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti memberi dampak positif dan menuai manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Di Desa Labbo, Sulawesi Selatan, masyarakat desa hutan berhasil memproduksi 16.500 liter gabah kopi dan menghasilkan Rp 420 juta pada 2019. Sedangkan warga di Desa Batu Ampar, Kalimantan Barat, pada April 2020 menghasilkan 3500 liter madu dengan pendapatan Rp 350 juta.

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Erna Rosdiana, mengatakan sesuai target RPJMN 2015-2019 distribusi perhutanan sosial baru mencapai 4,2 juta hektare dari target 12,7 juta hektare pada 2024. Langkah akselerasi terus dilakukan, didukung aturan testang perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja. "Masuknya perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja menjadi suatu kemajuan. Kini lebih kuat posisinya dengan peraturan perundang-undangan," kata dia, dalam diskusi Indonesia Forest Forum di kanal YouTube Tempo, Rabu, 11 November 2020.

Menurut Erna, perhutanan sosial ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, terdapat 620 desa di Indonesia yang tergabung dalam perhutanan sosial.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, mengatakan Surat Menteri Dalam Negeri No 522/1392/SJ Tahun 2020 menjadi pijakan penting dalam kemajuan masa depan perhutanan sosial. Dalam surat tersebut antara lain diatur agar pemerintah daerah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. "Selain surat tersebut, saat ini Kemendagri segera mengeluarkan rancangan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran tentang Peran Pemda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial. Ini penting mengingat goals dari perhutanan sosial adalah masyarakat sejahtera," ujarnya.

Dalam surat edaran diatur dukungan pengembangan perhutanan sosial, sinergitas dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Diharapkan kebijakan ini dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha perhutanan sosial. Koordinator Program Komunitas



PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN

PEMERINTAH mempercepat distribusi lahan untuk memperkuat perekonomian rakyat.

Konservasi Indonesia (KKI) WARSJI, Ade Candra, mengingatkan perhutanan sosial bukan hanya sebatas urusan perizinan, tetapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan. Sebab di lapangan, menurut dia, masyarakat sering kali menghadapi bencana karena pembukaan lahan, berkonflik dengan korporasi, masalah kemiskinan, dan persoalan lainnya.

Dari pengalaman melakukan pendampingan di beberapa provinsi, seperti di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Utara, masyarakat rata-rata sudah mengelola kawasan hutan negara jauh sebelum adanya aturan negara. "Mereka merasa takut mengelola tanah di dalam hutan karena belum ada peraturannya. Untuk lebih memudahkan mengorganisasi dan dapat fasilitas negara tentu diwadahi dalam sebuah lembaga, seperti koperasi atau lembaga pengelolaan hutan desa," kata Ade.

Direktur Perhutanan Sosial Perum Perhutani, Natalis Anis Harjanto, menekankan perlunya pelayanan kepada masyarakat terkait aspek legalitas, pengelolaan pascapanen, ataupun dalam

pengelolaan konflik. Selain itu, kata dia, penting untuk mengenali proses bisnis dan potensi kawasan yang dikerjasamakan. Aspek bisnis tidak hanya agroforestry, tetapi bisa masuk ke bisnis ekowisata, bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, industri kayu rakyat, dan sebagainya.

Adapun pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodiharjo, mengatakan jangan hanya melihat perhutanan sosial dari sisi administrasi di atas kertas karena faktor transaksional di lapangan. Ke depan, kata dia, tentu diperlukan kolaborasi dan koordinasi dari banyak pihak untuk menjawab berbagai tantangan. Agar tujuan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan bisa dicapai.

Program Indonesia Forest Forum : Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan, merupakan hasil kerja sama Tempo Media Group dan Ford Foundation, dan atas dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ●

Contoh Karya Tulis :



YAYASAN MADANI DAN YAYASAN ALAM SEHAT LESTARI



CEGAH DEFORESTASI UNTUK INDONESIA YANG LEBIH SEHAT

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan berpotensi memperparah pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi.

Pandemi Covid-19 di Indonesia dapat semakin buruk saat terjadi bersamaan dengan deforestasi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini mendorong Yayasan MADANI Berkelanjutan dan Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) bekerja sama dengan Tempo Media Group menyelenggarakan Webinar "Cegah Deforestasi untuk Indonesia yang Lebih Sehat" pada Kamis, 24 September 2020 secara daring di saluran Zoom, TV Tempo, YouTube serta Facebook Tempo Media.

Forum diskusi yang dipandu Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Monica Nirmala, Senior Public Health Advisor Yayasan ASRI; Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan; Andi Akmal Pashuddin, Anggota Komisi IV DPR RI; Doni Monardo, Ketua SATGAS Covid-19/Kepala BNPB; serta Nila Moeloek, Menteri Kesehatan RI 2014-2019 sebagai *keynote speaker*.

Membuka Webinar, Nila Moeloek menyampaikan, "Kita mengharapkan oksigen yang dengan mudah masuk paru-paru untuk bernapas, tapi ternyata virus (Covid-19) ini berisiko lebih besar saat paru-paru terganggu akibat kebakaran hutan," ujarnya.

Sebagai aksi riil pencegahan potensi bencana ganda ini, ASRI berinisiatif mendorong para profesional kesehatan di Indonesia untuk menyerukan pencegahan karhutla di era pandemi melalui surat terbuka bagi Presiden Joko Widodo. Surat terbuka yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 500 tenaga kesehatan profesional tersebut dibaca oleh Arif Wicaksono, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di tengah webinar.

Monica Nirmala menyampaikan,



surat terbuka ini adalah seruan bagi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat umum untuk memahami kaitan situasi pandemi dan karhutla secara menyeluruh. Hal ini penting, mengingat perlindungan hutan cukup krusial dalam mencegah serta memitigasi pandemi seperti Covid-19.

"Jangan melihat hutan hanya sebagai sesuatu yang bisa dicairkan atau dilikuidasi, tetapi bagaimana melihat hutan itu sebagai rumah dan juga sebagai paru-paru, hati serta sistem imun bagi kita umat manusia di dunia. Ketika kita menghancurkan hutan, justru kita merusak diri kita sendiri, merusak kesehatan kita sendiri," kata Monica.

Analisis dari MADANI Berkelanjutan menunjukkan adanya perluasan area potensi terbakar (APT) dari 18.000 hektare di bulan Juli jadi 84.000 hektare pada Agustus. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih waspada dan berusaha maksimal agar bencana yang lebih buruk dapat dihindari.

Menurut Teguh Surya, terdapat 3 faktor yang berpengaruh pada kenaikan atau penurunan karhutla setiap tahun, yaitu perubahan tutupan lahan, keberadaan izin, dan kerusakan fungsi ekosistem gambut. Idealnya dengan mengetahui hal ini, akar masalah semakin jelas dan upaya mitigasi dapat dilakukan sejak dini.

"Melindungi hutan dan memulihkan gambut serta memastikan tingkat kepatuhan pemilik izin untuk berkomitmen mencegah karhutla seharusnya dapat terjadi. Sayangnya, hal ini semuanya belum terjadi, masih terseok-seok di sana-sini," kata Teguh Surya.

Kondisi ini masih ditambah dengan hadirnya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menuai kontra dari masyarakat

karena berpotensi merusak dan menghilangkan luasan hutan lebih cepat di Indonesia. "RUU Cipta Kerja layak dihentikan pembahasannya oleh pemerintah dan wakil rakyat, untuk kemaslahatan umum, karena akan sangat merugikan dalam jangka panjang jika RUU tersebut disahkan," tambah Teguh.

Kajian MADANI menjelaskan bahwa hutan alam tersisa akan lebih cepat gundul jika RUU Cipta Kerja disahkan. Ada 5 provinsi yang terancam kehilangan seluruh hutan alaminya akibat deforestasi jika RUU tersebut disahkan, yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Dan ada beberapa provinsi terancam kehilangan seluruh hutan alam di luar area peta indikatif pemetaan pemberian izin baru (PIPIB) akibat deforestasi, yaitu Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Menanggapi hal ini, Andi Akmal Pashuddin justru mendukung segenap upaya yang dilakukan para aktivis lingkungan dalam mencegah deforestasi. "Kami di Komisi IV ini dengan fungsi anggaran DPR, memastikan bagaimana hutan kita lestari dan memberikan kontribusi bagi masyarakat," ucapnya.

Doni Monardo mewakili pemerintah dalam penanganan karhutla sekaligus pandemi Covid-19 menyampaikan, "Penyakit paru adalah salah satu penyakit penyerta yang berisiko (terpapar Covid-19). Oleh karenanya, apa pun yang mengeluarkan asap, itu sangat membahayakan, baik bagi orang dewasa, termasuk anak-anak. Jadi, tingkat polutan di sebuah daerah yang masih maksimal, agar upaya-upaya pelonggaran tidak dilakukan dulu."*

TIM INFO TEMPO